



**Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Berbasis Islam
(Studi Komparatif SMA UII Yogyakarta dan MA Al-Qodir Yogyakarta)***

Asyharul Muala

Dosen FMIPA Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

asyharulmuala@uii.ac.id

Abstrak

Artikel ini memaparkan tentang implementasi pendidikan multikultural di SMA UII dan Madrasah Aliyah Al-Qodiri Yogyakarta. Pendidikan multikultural sejatinya telah diimplementasikan di SMA UII dan MA Al-Qodiri. Meskipun demikian MA Al-Qodir lebih tampak multikulturalis dibanding SMA UII. Implementasi pendidikan multikultural di SMA UII antara lain terlihat dari latar belakang siswanya. beragam etnis/suku, bahasa, kultur, gender, ekonomi, dan afiliasi keagamaan. Pendidikan multikultural di SMA UII juga tampak dalam pembelajaran di kelas. Dari sisi gender, para guru tidak pernah membedakan jenis kelamin para siswanya. Semuanya memiliki hak yang sama dalam pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Dalam pembelajaran di kelas, guru juga berupaya berdiri di atas semua golongan/kelompok. Hal ini antara lain terlihat dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Saat mengajarkan materi yang mengandung *khilafiyah* (perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan), maka guru memberikan pemahaman dan mengajarkan semua perbedaan. Siswa tidak dipaksa untuk mengikuti salah satu kelompok/mazhab tertentu. Sementara itu, MA Al-Qodir sejak lama dikenal sebagai sekolah yang multikulturalis. Sekolah yang menyatu dengan Pesantren Al-Qodir ini secara eksplisit telah mengimplementasi pendidikan multikultural. Dalam kurikulum madrasah, tersurat sangat jelas muatan pendidikan multikulturalnya. Contohnya, Standar Kompetensi Lulusan MA Al-Qodir mengapresiasi perbedaan agama, bangsa, etnisitas, ras, dan kelompok-kelompok sosial ekonomi dalam konteks lokal dan global. Selain itu, ada cukup banyak program dan kegiatan yang mencerminkan terimplementasikannya pendidikan multikultural di Al-Qodir. Beberapa di antaranya adalah: *Pertama*, Pesantren Al-Qodir, termasuk MA Al-Qodir, menerima santri/siswa yang berasal dari kalangan pecandu narkoba untuk direhabilitasi. *Kedua*, Pesantren dan MA Al-Qodir menerima komunitas dari berbagai lintas iman untuk berbaur, menginap, dan berinteraksi (*live in*) dengan santri/siswa, pengurus, dan pengasuh Pesantren Al-Qodir. *Ketiga*, kunjungan 25 tokoh antariman (teolog) dari 17 negara berkembang ke Pesantren Al-Qodir untuk melakukan dialog antar iman.

* Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia. Penulis menghaturkan terima kasih kepada DPPM UII yang telah mendanai penelitian ini.

Abstract

This article describes the implementation of multicultural education at UII High School and Al-Qodiri High School. Multicultural education has been implemented by UII High School and Al-Qodiri High School. Nevertheless the MA Al-Qodir is more multicultural than UII High School. The implementation of multicultural education at UII High School can be seen from among others the background of their students who are diverse ethnic, ethnic, cultural, gender, economic, and religious affiliation. Multicultural education at UII High School is also evident in classroom learning. In terms of gender, the teachers never discriminated the sex of their students. All have the same rights in learning and activities at school. In classroom learning, the teacher also challenges standing above all groups. This can be seen in the learning of Islamic Education. When talking about material that contains *khilafiyah*, the teacher provides understanding and teach all the differences. Students are also not allowed to attend one particular group. Meanwhile, MA Al-Qodir has long been known as a multicultural school. Schools that are integrated into the Al-Qodir Islamic boarding school have explicitly implemented multicultural education. In the madrasa curriculum, it clearly states the multicultural education. For example, in the graduate competency standards (SKL) MA Al-Qodir appreciates diversity of religions, nations, ethnicity, races, and socio-economic groups in local and global relations. In addition, there are quite a number of programs and activities that reflect the implementation of multicultural education in Al-Qodir. Some of them are: First, the Al-Qodir Islamic Boarding School, including the MA Al-Qodir, accepts students obtained from drug addicts to be rehabilitated. Secondly, Islamic Boarding Schools and MA Al-Qodir receive communities from various faiths to mingle, stay and communicate (live in) with *santri* (students), administrators, and caregivers of the Al-Qodir Islamic Boarding School. Third, the visit of 25 interfaith leaders from 17 developing countries to Al-Qodir Islamic Boarding School for interfaith dialogue.

Keywords: school, madrasah, plurality, multicultural education

PENDAHULUAN

Saat ini dapat dikatakan kesadaran masyarakat Indonesia akan multikulturalisme mulai meluntur. Buktinya, beragam konflik dan kekerasan berlatar belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) akhir-akhir ini kerap terjadi di bumi nusantara. Zakiyuddin Baidhawiy (2007: 28) menyebutkan setidaknya ada tiga penjelasan yang dapat digunakan sebagai indikator rendahnya kesadaran multikultural masyarakat Indonesia. *Pertama*, rendahnya pengetahuan sebagian masyarakat Indonesia terhadap agama dan etnik lain. *Kedua*, keinginan untuk memahami budaya lain masih sangat rendah. *Ketiga*, rendahnya penghormatan terhadap kultur dan agama lain.

Jika ditelusuri secara psikologis-sosiologis, munculnya konflik dan kekerasan di Indonesia sesungguhnya berakar dari prasangka-prasangka sosial (*social prejudice*). Prasangka sosial sendiri

lahir karena masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menerima kehadiran kelompok masyarakat lain yang berbeda. Masyarakat yang tidak multikulturalis antara lain memiliki cenderung mengedepankan egoisme primordial di mana menganggap kelompoknya sebagai satu-satunya kelompok yang paling benar. Sebaliknya, kelompok lain dianggapnya sebagai kelompok yang salah dan sesat. Bahkan, tidak jarang dianggapnya sebagai ancaman.

Merebaknya prasangka-prasangka sosial tentu saja dapat mengancam integrasi bangsa Indonesia. Untuk dapat mengelola prasangka-prasangka sosial supaya tidak mengoyak kebhinekaan, maka diperlukan berbagai upaya untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai multikultural yang menghargai terhadap segenap perbedaan ke santero negeri, sehingga akan mengikis prasangka-prasangka sosial. Salah satu ranah yang dapat digarap untuk mendakwahkan nilai-nilai multikultural adalah melalui

pendidikan. Sebab, pendidikan menyediakan ruang-ruang bagi penanaman dan pengimplimentasian nilai-nilai etika dan kebajikan. Dalam konteks ke-Indonesia-an yang multikultural, pendidikan yang tepat untuk menanamkan dan menggaungkan nilai-nilai pluralitas/multikultural salah satunya adalah pendidikan multikultural. Sebab, pendidikan multikultural menyediakan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya beragam perbedaan dan keragaman.

Mengingat bangsa ini rentan terhadap konflik sosial-keagamaan, maka kehadiran pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang urgen dan signifikan di semua institusi/lembaga pendidikan. Apalagi saat ini ada kecenderungan kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang mengajarkan doktrin garis keras (radikalisme) di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Manakala institusi pendidikan telah terjangkiti oleh virus radikalisme agama, maka harapan untuk menciptakan generasi yang multikulturalis sepertinya hanya akan sia-sia. Jika yang terjadi demikian, maka bukan tidak mungkin persatuan dan kesatuan bangsa yang telah susah payah dirajut akan terkoyak.

Dalam konteks Yogyakarta, pendidikan multikultural ini urgen untuk diimplementasikan mengingat tingkat intoleransi dan kekerasan di kalangan pelajar Yogyakarta belakangan ini cukup tinggi. Tingginya tingkat intoleransi di kalangan pelajar ini antara lain dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan LKiS terhadap 760 responden dari 20 SMU di DIY pada tahun 2009 misalnya disebutkan bahwa 6,4% siswa SMU di DIY memiliki pandangan yang rendah dalam hal toleransi, 69,2% siswa SMU di DIY memiliki pandangan yang sedang dalam hal toleransi, dan hanya 24,3% siswa SMU di DIY yang memiliki pandangan yang tinggi dalam hal

toleransi. Sedangkan dalam hal tindakan sebanyak 31,6% siswa SMU di DIY memiliki tingkat toleransi beragama yang rendah, 68,2% siswa SMU di DIY memiliki tingkat toleransi beragama yang sedang, dan hanya 0,3% siswa SMU di DIY memiliki tingkat toleransi beragama yang tinggi (Wajidi, dkk., 2009). Secara umum, tingkat intoleransi di Yogyakarta cukup tinggi. Fakta ini antara lain diungkapkan oleh Wahid Foundation yang menobatkan Yogyakarta sebagai kota paling tidak toleran nomor dua di Indonesia pada 2014. Dari total 154 kasus intoleransi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dicatat Wahid Foundation sepanjang tahun itu, 21 peristiwa terjadi di Yogyakarta. Setahun kemudian, tahun 2015, peringkat Yogyakarta sebagai kota intoleran turun ke nomor empat. Dari 190 pelanggaran yang dicatat Wahid Foundation, 10 terjadi di kota pelajar itu (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160808211440-20-150068/yogyakarta-kota-yang-makin-tak-toleran/>)

Demikian pula dengan tingkat kekerasan di kalangan pelajar kota Yogyakarta juga cukup tinggi. Fakta ini dapat dilihat misalnya dari kasus-kasus *klitih* yang belakangan ini marak terjadi di kota pelajar. *Klitih* merupakan salah satu bentuk anarkisme remaja. *Klitih* identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Ironisnya *klitih* juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti pisau, gir, pedang samurai, dan lain-lain. Tragedi *klitih* di kalangan pelajar Yogyakarta mengakibatkan korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia.

Kasus tersebut merupakan salah satu dari deretan kasus kekerasan *klitih* sebelumnya yang dilakukan remaja di Yogyakarta tahun ini. Pada Oktober 2016 Puluhan oknum remaja menggunakan

sepeda motor secara tiba-tiba membacok dua remaja di daerah Sampaan, Sendangtirto, Berbah, Kabupaten Sleman. Para pelaku yang akhirnya ditangkap Polres Sleman, diketahui merupakan remaja di bawah umur dengan status pelajar. Selanjutnya, pada Agustus 2016 kasus kekerasan terjadi di Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta yang menimpa Septian Iqbal Dinaka Rofiki (16 tahun). Iqbal yang mengalami luka berat pada kepala bagian belakang akhirnya meninggal dunia. Lagi-lagi pelaku yang akhirnya tertangkap aparat kepolisian yang berinisial BMI juga diketahui masih berusia 17 tahun. Pada Juli 2016, aparat Polsek Gondokusuman, Kota Yogyakarta juga menangkap sembilan pelajar SMP karena melakukan pengeroyokan terhadap seorang pelajar kelas 1 SMA. Ironisnya, modus pengeroyokan hanyalah sekadar “iseng” mencari musuh belaka (<http://jowonews.com/2016/12/16/kekerasan-pelajar-yogyakarta-tinggi/>). Melihat tingginya tingkat intoleransi dan kekerasan di Yogyakarta, khususnya di kalangan pelajar inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pendidikan multikultural di sekolah-sekolah berbasis Islam, yakni SMA UII Yogyakarta dan MA Al-Qodir Yogyakarta.

Cukup banyak karya yang mengupas tentang kajian pendidikan multikultural atau kajian yang mirip dengan tema tersebut. Namun sayangnya, karya-karya berikut belum memaparkan praktik pendidikan multikultural di SMA UII dan SMA Muhammadiyah. Beberapa karya tersebut antara lain karya Hudan Mudaris (2009) dalam artikelnya yang berjudul “Pendidikan Multikulturalisme dan Upaya Mewujudkan *Civil Society* di Indonesia” menuturkan bahwa sektor pendidikan memiliki peran yang strategis sekaligus fungsional, dan model pendidikan yang tepat adalah pendidikan multikultural (*multicultural education*). Hal ini karena pendidikan multikultural

melihat masyarakat secara luas dari keberbedaannya yang dimilikinya.

Nuhraini Palipung (2016: 558-566) dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Inklusi SD Taman Muda Ibu Pawiyatan Taman Siswa Yogyakarta” mendeskripsikan bahwa implementasi pendidikan multikultural di Sekolah Inklusi SD Taman Muda Ibu Pawiyatan Taman Siswa dilakukan melalui, (1) integrasi kedalam kegiatan pengembangan diri secara terprogram dan tidak terprogram. (2) integrasi kedalam mata pelajaran PKn, IPS dan Ketamansiswaan. Beberapa faktor pendukungnya adalah iklim sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana, peran guru, program dan kegiatan sekolah, serta peserta didik. Sementara faktor-faktor penghambat adalah sikap individu, kurangnya media dan poster-poster tentang keberagaman dan nilai-nilai multikultural, dan kurangnya sosialisasi pendidikan multikultural. Upaya untuk mengatasi hambatan implementasi pendidikan multikultural di Sekolah Inklusi SD Taman Muda Ibu Pawiyatan Taman Siswa Yogyakarta adalah dengan menekankan tentang nilai-nilai menghargai, menghormati dan toleransi. Selain itu, adanya kebijakan sekolah yang mengimplementasikan pendidikan budi pekerti luhur, menambah poster-poster keberagaman, dan mengintensifkan sosialisasi pendidikan multikultural.

Jiyanto dan Amirul Eko Efendi (2016: 25-43) dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Pendidikan Multikultural di Madrasah Inklusi Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta” menemukan bahwa dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural, MAN Maguwoharjo menerapkannya di dalam kelas dan di luar kelas. Implementasi pendidikan multikultural di dalam kelas dilakukan melalui kurikulum. MAN Maguwoharjo, dalam memberikan pendidikan

multikultural tidak hanya diberikan lewat teori, atau dengan menambahkan ke dalam kurikulum yang sudah ada, tetapi juga melalui praktik mengajar seperti disisipkan pada materi yang membahas masalah keberagaman seperti IPS, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara implementasi pendidikan di luar kelas dilakukan dengan menyisipkan materi berkonten nilai-nilai multikultural melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler seperti kegiatan olah raga, seni, ilmu pengetahuan, keagamaan, *library visit*, dan studi lapangan (*field study*).

Pembahasan

Sekilas Profil SMA UII dan MA Al-Qodir

SMA UII Yogyakarta didirikan oleh Badan Wakaf UII Yogyakarta. Berdiri dengan SK Nomor 15 Tahun 1994 tertanggal 15 Mei 1994, kemudian dikukuhkan oleh SK Kakanwil Depdikbud Provinsi DIY, Drs. H. Sutopo Sahib pada tanggal 16 Juli 1994 bertepatan tanggal 7 Shafar 1415 Hijriyah. Empat tahun kemudian di akreditasi mendapat status disamakan berdasarkan SK Direktur Jendereal Pendidikan RI Nomor: 35/C.C7/Kep/MN/1998 tertanggal 10 Maret 1998 dan di akreditasi ulang pada tahun 2003 dan status ini masih tetap bertahan berdasarkan SK Kepala Dinas P & K kabupaten Bantul Nomor: 119.a Tahun 2003, tanggal 1 November 2003. Pada tanggal 20 November 2006 Badan Akreditasi Nasional (BAN) menetapkan nilai akreditasi A (sangat baik) dengan nilai 90,95 dan untuk akreditasi sampai saat ini masih mempertahankan nilai A (amat baik) dengan nilai 96,16 ditetapkan oleh BAN pada tanggal 12 November 2010 berlaku sampai tahun ajaran 2015/2016.

Gagasan pendirian sekolah menengah sebagai ajang penelitian dan latihan mengajar mahasiswa Fakultas

Tarbiyah sejak kurang lebih sepuluh tahunan dimunculkan. Namun demikian, baru dalam beberapa tahun terakhir, ide tersebut mendapatkan kepastian tempat dalam keputusan Badan Wakaf UII. Pendirian sekolah selain sebagai laboratorium penelitian sekolah juga sebagai lembaga persiapan untuk mendapatkan bibit-bibit unggul calon mahasiswa UII.

Sementara itu, pendirian MA al-Qodir tidak dapat dilepaskan dari Pesantren Al-Qodir. Sebab, madrasah ini merupakan bagian dari pengembangan Pesantren Al-Qodir. MA Al-Qodir terletak di Dusun Tanjung, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesantren Al-Qodir didirikan oleh KH Masrur Ahmad MZ. Pendirian Pesantren Al-Qodir sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1980-an. Namun demikian, pembangunan gedung yang menjadi asrama para santri, masjid, dan fasilitas lain, mulai tahun 1990 bersamaan datangnya sejumlah santri ke Pesantren Al-Qodir. Meskipun telah menerima santri sejak tahun 1990, namun secara resmi Pesantren Al-Qodir berdiri pada tahun 1998 dengan status Yayasan yang dikukuhkan dengan akta notaris dan tercatat resmi di Kementerian Agama RI.

Pesantren Al-Qodir merupakan pesantren salafiyah yaitu pesantren tradisional yang tetap mempertahankan serta mengajarkan kitab-kitab klasik atau kitab kuning sebagai inti pendidikan di pesantren. Pada masa awal berdiri, fasilitas yang dimiliki seperti masjid, asrama, kamar mandi, masih sangat terbatas. Aktivitas pesantren juga lebih banyak dilakukan di luar kawasan pesantren. Hal ini karena pada masa-masa awal berdiri, pengasuh Pesantren Al-Qodir lebih sering melakukan pengajian keliling keluar masuk kampung untuk melakukan dakwah Islam. Meskipun merupakan pesantren

salafiyah yang mengajarkan kitab-kitab klasik kepada para santrinya, Pesantren Al-Qodir juga merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan karakter dan moral masyarakat. Tidak heran jika santri yang datang ke Pesantren Al-Qodir banyak pula yang berasal dari kalangan pecandu narkoba yang ingin sembuh dan orang yang mengalami gangguan jiwa untuk mengikuti terapi secara keagamaan (<http://santrialqodir.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-pondok-pesantren-al-qodir.html>).

Seiring dengan berjalannya waktu, Pesantren Al-Qodir berkembang cukup pesat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan santrinya akan pendidikan formal, maka Yayasan Pesantren Al-Qodir mendirikan sekolah formal, dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Madrasah Aliyah (MA). Sebagai sekolah yang relatif baru, kehadiran MA Al-Qodir menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat sekitar dan khususnya santri untuk mengenyam pendidikan formal. Madrasah Aliyah Al-Qodir yang merupakan madrasah Berbasis Pesantren, memiliki karakteristik "*Intigrated School*". Karakteristik tersebut dapat diartikan sebagai penyelenggaraan program pendidikan dengan (1) menyatu-padukan antara program pendidikan umum, pendidikan agama yang berbasis pesantren dan pendidikan *life skill*, (2) menyatu-padukan pendidikan umum dengan penekanan pada keunggulan program dan prestasi dibidang tertentu, dan (3) menyatu-padukan pendidikan agama Islam dengan kemampuan dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, membaca kitab kuning, *tahfidzul quran* dan ketrampilan komputer.

Implementasi Pendidikan Multikultural di SMA UII dan MA Al-Qodir

Pendidikan multikultural sedikit banyak telah diimplementasikan di SMA UII dan MA Al-Qodiri. Meskipun

demikian, secara eksplisit, implementasi pendidikan multikultural lebih terlihat di MA Al-Qodiri. Implementasi pendidikan multikultural di SMA UII antara lain terlihat dari latar belakang siswanya. Menurut Sumaryatin, Kepala SMA UII, siswanya berasal dari berbagai daerah, beragam etnis/suku, bahasa, kultur, gender, ekonomi, dan afiliasi keagamaan. Dari sisi latar belakang daerah, siswa UII berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan tidak sedikit pula yang berasal dari luar Jawa seperti Sumatera dan Papua. Sementara dari sisi etnisitas, siswa SMA UII ada yang etnis Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan sebagainya. Secara etno-kultural mereka pastinya memiliki budaya yang berbeda. Sementara dari sisi bahasa, karena dari berasal dari berbagai daerah, maka bahasa daerahnya pun berbeda-beda. Dari latar belakang ekonomi, siswa SMA UII berasal dari beragam kelas ekonomi, ada ekonomi rendah, menengah, hingga ekonomi atas. Sementara dari sisi gender, siswa SMA UII tidak hanya berjenis kelamin laki-laki tetapi juga perempuan. Sedangkan dari afiliasi keagamaan, ada yang Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis dan ormas lainnya.

Mencermati keragaman siswanya tersebut, Sumaryatin sebagai kepala sekolah, senantiasa menekankan pentingnya pendidikan keragaman/multikultural, terutama kepada guru-guru SMA UII. Pentingnya pendidikan multikultural ini diaktualisasikannya melalui kebijakan-kebijakan sekolah yang non-diskriminatif. Sekedar contoh, saat salat Jumat berjamaah, khatib dan imamnya digilir. Tidak hanya dari kalangan tertentu saja, misalnya NU saja atau Muhammadiyah saja. Kemudian, saat selesai salat tepatnya saat wirid, ia membiarkan imam jika melafalkan wiridan dengan bersuara keras. Baginya, wiridan dengan suara keras atau pelan/tidak bersuara, sama saja. Ia

menyerahkan sepenuhnya pada imam salat. Jika pun ada yang meyakini bahwa melafalkan wiridan dengan suara pelan atau bahkan tidak bersuara (dilafalkan dalam hati), sebagai kepala sekolah, ia pun sangat menghargainya (Wawancara dengan Sumaryatin, 10/11/2017).

Pendidikan multikultural di SMA UII juga tampak dalam pembelajaran di kelas. Dari sisi gender, para guru tidak pernah membedakan jenis kelamin para siswanya. Semuanya memiliki hak yang sama dalam pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Saat di kelas, saat diskusi misalnya, semuanya boleh bertanya dan memberikan pendapat. Guru dalam memberikan penilaian juga tidak membedakan jenis kelamin. Jika siswa mampu mengerjakan soal ujian dan tugas dengan bagus, tentu saja akan dinilai bagus, tidak peduli apakah ia siswa putra atau putri. Demikian juga sebaliknya, jika siswa tidak mampu mengerjakan soal ujian dan tugas dengan baik, maka akan dinilai buruk (Wawancara dengan Ratna, guru PKN, 10/11/2017). Keadilan gender juga berlaku dalam konteks kepemimpinan organisasi kesiswaan seperti OSIS, Rohani Islam (Rohis), Pramuka, dan lain-lain. Baik siswa putra maupun putri memiliki hak menjadi anggota organisasi kesiswaan. Tidak itu saja siswa, baik putra maupun putri juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin organisasi kesiswaan (Wawancara dengan Sumaryatin, 10/11/2017). Hal ini dibenarkan oleh Zula Nur Rahman, siswa SMA UII, yang mengatakan bahwa dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan sekolah, dan kepemimpinan organisasi kesiswaan, tidak ada diskriminasi atas dasar gender (Wawancara dengan Zula Nur Rahman, 9/11/2017). Ungkapan hampir senada juga dikemukakan oleh Nia, siswi SMA UII. Ia mengatakan bahwa tidak sedikit perempuan yang menjadi anggota bahkan *leader* (pemimpin) organisasi kesiswaan

sekolah (Wawancara dengan Nia, 15/11/2017).

Dalam pembelajaran di kelas, guru juga berupaya berdiri di atas semua golongan/kelompok. Hal ini antara lain terlihat dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Saat mengajarkan materi yang mengandung *khilafiyah* (perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan), maka guru memberikan pemahaman dan mengajarkan semua perbedaan. Siswa tidak dipaksa untuk mengikuti salah satu kelompok/mazhab tertentu. Misalnya, siswa ber-*back ground* Muhammadiyah tidak dipaksa untuk mengikuti *amaliyah* Nahdlatul Ulama (NU) dan sebaliknya, siswa berlatar belakang afiliasi keagamaan NU tidak dipaksa mengikuti *amaliyah* Muhammadiyah. Semua diserahkan sepenuhnya pada siswa. Guru hanya memberikan penjelasan dan pemahaman akan perbedaan pandangan keagamaan tersebut. Menyimak realitas tersebut, SMA UII telah menerapkan pendidikan multikultural. Sebab, pendidikan multikultural mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya semisal gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama (Mahfud, 2006: 169).

Menurut Mat Suf, guru PAI, dalam pelajaran PAI kelas X ada materi tentang saling menghargai perbedaan. Untuk kelas XII, ada materi tentang toleransi. Dalam materi ini, Mat Suf, cukup sering memutar video dokumenter tentang multikulturalisme. Video ini misalnya diambil dari Youtube. Selain memutar video, ia juga menggunakan metode diskusi sesuai dengan materi pelajaran. Di sini, ia meminta siswa saling berbaur. Menurutnya selain mendapatkan materi seperti *khuznudzon*, siswa akan semakin saling berinteraksi, serta mengenal satu sama lain dan diharapkan dapat saling menghargai (Wawancara dengan Mat Suf, 10/11/2017).

Sementara itu, MA Al-Qodir sejak lama dikenal sebagai sekolah yang multikulturalis. Sekolah yang menyatu dengan Pesantren Al-Qodir ini secara eksplisit telah mengimplementasi pendidikan multikultural. Dalam kurikulum madrasah, tersurat sangat jelas muatan pendidikan multikulturalnya. Misalnya, dalam standar kompetensi lulusan (SKL) MA Al-Qodir antara lain menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial-ekonomi dalam lingkup lokal maupun global. Selain itu, implementasi pendidikan multikultural dapat dilihat dari aspek-aspek kecakapan hidup yang dikembangkan dalam kurikulum MA Al-Qodir antara lain: (1) Memberikan kesempatan beribadah kepada pemeluk agama lain; (2) Pemeluk agama lain dihormati, (3) Tidak memaksa pemeluk agama lain mengikuti agamanya; (4) Latar belakang suku dan golongan tidak dibedakan; (5) Inisiatif dari teman seagama dan beda agama dihormati (Lihat Kurikulum MA Al-Qodir Tahun Pelajaran 2016/2017).

Selain terkandung dalam kurikulum madrasah/sekolah, pendidikan multikultural juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di pesantren maupun dalam pembelajaran di kelas. Tidak ada pembedaan perlakuan antara siswa/santri. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Zaqi Albana, Kepala Sekolah MA Al-Qodir, yang menyebutkan bahwa semua santri diperlakukan sama (Wawancara, Muhammad Zaqi Albana, 16/11/2017). Hal ini juga diamini oleh Ustad Fahmi, guru MA Al-Qodir, yang mengatakan bahwa pengasuh pesantren, pengurus, dan guru MA Al-Qodir tidak pernah membeda-bedakan siswa/santrinya atas dasar apapun, baik latar belakang sosial-ekonomi, daerah, jenis kelamin, budaya dan lain-lain. Saat menjadi siswa Al-Qodir semua diperlakukan sama (Wawancara dengan Ustad Fahmi,

16/11/2017). Ketika peneliti *cross check* ke siswa MA Al-Qodir terkait hal itu, jawaban atau respons siswa-siswi MA Al-Qodir pun sama. Ahmad, siswa MA Al-Qodir, mengatakan bahwa selama ia menjadi santri/siswa di MA Al-Qodir, pihak pesantren/sekolah tidak pernah membeda-bedakan santri/siswanya (Wawancara dengan Muhammad, 17/11/2017). Jawaban hampir senada juga dikemukakan oleh Annisa, siswi MA Al-Qodir yang mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi antara santri satu dengan santri yang lainnya. Semua diperlakukan dan dianggap sama. Ia lebih lanjut mengatakan meskipun dirinya perempuan, namun tidak pernah satu pun guru atau pengurus yang membeda-bedakan hanya karena ia perempuan. Baik siswa/santri putra maupun putri diperlakukan sama (Wawancara dengan Annisa, 17/11/2017).

Lebih dari itu, ada cukup banyak program dan kegiatan yang mencerminkan terimplementasikannya pendidikan multikultural di Al-Qodir. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Pesantren Al-Qodir, termasuk MA Al-Qodir menerima santri/siswa yang berasal dari kalangan pecandu narkoba untuk direhabilitasi. Hal ini menarik mengingat tidak banyak lembaga pendidikan yang mau menerima pecandu narkoba. Hal ini semakin mengokohkan bahwa Al-Qodir merupakan institusi pendidikan multikulturalis karena mau menerima kalangan manapun, termasuk pecandu narkoba.

Kedua, Pesantren dan MA Al-Qodir menerima komunitas dari berbagai lintas iman untuk berbaur, menginap, dan berinteraksi (*live in*) dengan santri/siswa, pengurus, dan pengasuh Al-Qodir. Komunitas-komunitas tersebut belajar banyak tentang kehidupan pesantren, berbaur, *sharing* dan melakukan diskusi secara intensif dengan santri, pengurus,

dan pengasuh pesantren. Salah satu komunitas yang *live in* di pesantren tersebut adalah siswa SMA Kolese De Brito Yogyakarta. Kegiatan tersebut bertajuk taaruf lintas iman. Dalam *live in* tersebut, selain menjadi “santri”, mereka juga mengkaji Islam dan kehidupan pesantren. Terlepas pro-kontra yang menyertainya di masyarakat, kegiatan ini menunjukkan pendidikan multikultural terutama dalam konteks multikulturalisme agama.

Ketiga, kegiatan lain yang menunjukkan bahwa MA Al-Qodir telah mengimplementasikan pendidikan multikultural secara kongkrit adalah adanya kunjungan 25 tokoh antariman (teolog) dari 17 negara berkembang ke Pesantren Al-Qodir untuk berdialog dengan para santri/siswa dan pengasuh. Para teolog itu tergabung dalam EATWOT (Ecumenical Association Of Third World Theologians) yang berasal dari negara-negara berkembang. Para teolog tersebut melakukan dialog antar iman di Pesantren Al-Qodir. Menurut K.H. Masrur Ahmad, pengasuh Pesantren Al-Qodir, Pesantren Al-Qodir sudah sering dijadikan tempat pertemuan tokoh-tokoh lintas iman, bahkan beberapa perguruan tinggi, juga sering mengajak mahasiswanya untuk menjalani perkuliahan teologi dengan berbaur bersama para santri tanpa harus saling menyalahkan keyakinan dari masing-masing pihak (<https://jogja.antaranews.com/berita/teolog-dunia-akan-kunjungi-ponpes-al-qodir>).

Implementasi pendidikan multikultural di SMA UII dan MA Al-Qodir sesungguhnya juga terdapat dalam sejumlah mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila kewarganegaraan, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Sama seperti di sekolah-sekolah lain, muatan pendidikan multikultural yang terdapat pada berbagai mata pelajaran tersebut hanya diajarkan secara sekilas dan tidak mendetail.

Dari paparan tentang implementasi pendidikan multikultural di atas, terlihat jelas visi (pendidikan) multikulturalisme SMA UII dan MA Al-Qodir. Visi (pendidikan) multikulturalisme kedua sekolah tersebut sejalan dengan pendapat James Lynch (1986: 86-87) yang menyebutkan bahwa institusi pendidikan dikatakan multikulturalis bilamana lembaga pendidikan bersangkutan telah mengajarkan penghargaan kepada orang lain (*respect for others*) dan penghargaan kepada diri sendiri (*respect for self*) yang diimplementasikan melalui tiga ranah pembelajaran (*domain of learning*) yaitu: pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), dan sikap (*affective*). Meskipun demikian, tetap saja ada perbedaan dalam hal implementasi pendidikan multikultural di kedua sekolah tersebut. Berdasarkan paparan di atas, sebagaimana telah disinggung di muka, MA Al-Qodir lebih tampak multikulturalis dibanding SMA UII. Bagaimana pun juga, baik SMA UII maupun MA Al-Qodir, dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, sesungguhnya telah mengajarkan dan mengimplementasikan pendidikan multikultural.

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural sedikit banyak telah diimplementasikan di SMA UII dan MA Al-Qodiri. Meskipun demikian MA Al-Qodir lebih tampak multikulturalis dibanding SMA UII. Implementasi pendidikan multikultural di SMA UII antara lain terlihat dari latar belakang siswanya. beragam etnis/suku, bahasa, kultur, gender, ekonomi, dan afiliasi keagamaan. Dari sisi latar belakang daerah, siswa UII berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan tidak sedikit pula yang berasal dari luar Jawa seperti Sumatera dan Papua. Sementara dari sisi etnisitas, siswa SMA

UII ada yang etnis Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan sebagainya. Secara etno-kultural mereka pastinya memiliki budaya yang berbeda. Sementara dari sisi bahasa, karena dari berasal dari berbagai daerah, maka bahasa daerahnya pun berbeda-beda. Dari latar belakang ekonomi, siswa SMA UII berasal dari beragam kelas ekonomi, ada ekonomi rendah, menengah, hingga ekonomi atas. Sementara dari sisi gender, siswa SMA UII tidak hanya berjenis kelamin laki-laki tetapi juga perempuan. Sedangkan dari afiliasi keagamaan, ada yang Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Oleh karena itu, SMA UII menekankan pentingnya pendidikan keragaman/multikultural, terutama kepada guru-guru SMA UII. Pentingnya pendidikan multikultural ini diaktualisasikannya melalui kebijakan-kebijakan sekolah yang non-diskriminatif

Pendidikan multikultural di SMA UII juga tampak dalam pembelajaran di kelas. Dari sisi gender, para guru tidak pernah membedakan jenis kelamin para siswanya. Semuanya memiliki hak yang sama dalam pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Saat di kelas, saat diskusi misalnya, semuanya boleh bertanya dan memberikan pendapat. Guru dalam memberikan penilaian juga tidak membedakan jenis kelamin. Jika siswa mampu mengerjakan soal ujian dan tugas dengan bagus, tentu saja akan dinilai bagus, tidak peduli apakah ia siswa putra atau putri. Demikian juga sebaliknya, jika siswa tidak mampu mengerjakan soal ujian dan tugas dengan baik, maka akan dinilai buruk. Keadilan gender juga berlaku dalam konteks kepemimpinan organisasi kesiswaan seperti OSIS, Rohani Islam (Rohis), Pramuka, dan lain-lain. Baik siswa putra maupun putri memiliki hak menjadi anggota organisasi kesiswaan. Dalam pembelajaran di kelas, guru juga berupaya berdiri di atas semua golongan/kelompok. Hal ini antara lain terlihat dalam pembelajaran Pendidikan

Agama Islam. Saat mengajarkan materi yang mengandung *khilafiyah* (perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan), maka guru memberikan pemahaman dan mengajarkan semua perbedaan. Siswa tidak dipaksa untuk mengikuti salah satu kelompok/mazhab tertentu.

Sementara itu, MA Al-Qodir sejak lama dikenal sebagai sekolah yang multikulturalis. Sekolah yang menyatu dengan Pesantren Al-Qodir ini secara eksplisit telah mengimplementasi pendidikan multikultural. Dalam kurikulum madrasah, tersurat sangat jelas muatan pendidikan multikulturalnya. Selain terkandung dalam kurikulum madrasah/sekolah, pendidikan multikultural juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di pesantren maupun dalam pembelajaran di kelas. Tidak ada perbedaan perlakuan antara siswa/santri. Selain itu, ada cukup banyak program dan kegiatan yang mencerminkan terimplementasikannya pendidikan multikultural di Al-Qodir. Beberapa di antaranya adalah: *Pertama*, Pesantren Al-Qodir, termasuk MA Al-Qodir, menerima santri/siswa yang berasal dari kalangan pecandu narkoba untuk direhabilitasi. Hal ini semakin mengokohkan bahwa Al-Qodir merupakan institusi pendidikan multikulturalis karena mau menerima kalangan manapun, termasuk pecandu narkoba. *Kedua*, Pesantren dan MA Al-Qodir menerima komunitas dari berbagai lintas iman untuk berbaur, menginap, dan berinteraksi (*live in*) dengan santri/siswa, pengurus, dan pengasuh Pesantren Al-Qodir. *Ketiga*, kunjungan 25 tokoh antariman (teolog) dari 17 negara berkembang ke Pesantren Al-Qodir untuk melakukan dialog antar iman dengan pengasuh dan santri/siswa MA Al-Qodir.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Dadang. 2000. *Metodologi Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka.
- Baidhaw, Zakiyuddin. 2007. "Building Harmony and Peace through Multiculturalist Theology-Based Religious Education: an Alternative for Contemporary Indonesia", *British Journal of Religious Education*, Vol. 29. No. 1 January 2007.
- Effendy, Bachtiar. 2005. "Menumbuhkan Sikap Menghargai Pluralitas Keagamaan: Dapatkah Sektor Pendidikan Diharapkan?", dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidei.
- Jiyanto dan Amirul Eko Efendi. 2016. "Implementasi Pendidikan Multikultural di Madrasah Inklusi Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta". *Jurnal Penelitian*. Vol. 10, No. 1 Februari 2016.
- Lynch, James. 1986. *Multicultural Education: Principles and Practice*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Mahfud, Choirul. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudaris, Hudan. 2009. "Pendidikan Multikulturalisme dan Upaya Mewujudkan *Civil Society* di Indonesia" dalam A. Mustofa Bisri, dkk. *Renaisans Indonesia: Transformasi Menuju Masyarakat Berkeadaban*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Palipung, Nuhraini. 2016. "Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Inklusi SD Taman Muda Ibu Pawiyatan Taman Siswa Yogyakarta", *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. Edisi 5 Vol. V Tahun 2016.
- Parekh, Bhikhu. 2002. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press.
- Salim, Hairus dan Suhadi. 2007. *Membangun Pluralisme dari Bawah*. Yogyakarta: LKiS.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Yaqin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.